JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

Perkembangan Dinasti Utsmani/ Ottoman: Kebangkitan Neo-Ottomanisme, Apakah Turki Menghidupkan Kembali Warisan Ottoman

The Development of the Ottoman Dynasty: The Rise of Neo-Ottomanism, Is Türkiye Reviving the Ottoman Legacy?

Nurul Fauziah[1], Alan Maulana[2], Adam Adrian[3], Ahmad Maftuh Sujana[4]
Uniersitas Islam Negri Sulthan Maulana Hasanudin Banten
e.mail :nfauziah@gmail.com[1], alanmaulana17@gmail.com[2], papskay2020@gmail.com[3]

Article Info

Article history :
Received : 07-05-2025
Revised : 09-05-2025
Accepted : 11-05-2025
Pulished : 13-05-2025

Abstract

The Ottoman Empire was once a dominant power in the Islamic world for over six centuries before its decline in the early 20th century. In recent decades, especially under the leadership of Recep Tayyip Erdoğan, a political and cultural orientation known as Neo-Ottomanism has emerged. This movement not only revives historical symbols—such as the reconversion of Hagia Sophia into a mosque—but also positions Turkey as a modern center of Islamic civilization. Neo-Ottomanism serves as a strategy of political identity and cultural diplomacy that blends nationalism, Islamism, and the Ottoman legacy. This article examines how Turkey utilizes historical narratives and digital media to build transnational solidarity in the Islamic world while negotiating its position amid global geopolitical shifts. The central question addressed is whether this revival is merely a romanticization of the past or a serious attempt to resurrect the Ottoman legacy in a contemporary context?.

Keywords: Neo-Ottomanism, Ottoman Empire, Erdogan

Abstrak

Dinasti Utsmani (Ottoman) pernah menjadi kekuatan besar dunia Islam selama lebih dari enam abad sebelum runtuh pada awal abad ke-20. Namun dalam beberapa dekade terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, muncul kembali orientasi politik dan budaya yang disebut Neo-Ottomanisme. Gerakan ini tidak hanya menghidupkan simbol-simbol kejayaan masa lalu seperti konversi Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi juga menempatkan Turki sebagai pusat peradaban Islam modern. Neo-Ottomanisme menjadi strategi politik identitas dan diplomasi budaya yang menyatukan nasionalisme, Islamisme, dan warisan sejarah Ottoman. Artikel ini membahas bagaimana Turki menggunakan narasi sejarah dan media digital untuk membangun solidaritas transnasional di dunia Islam sekaligus menegosiasikan posisinya di tengah dinamika geopolitik global. Pertanyaan utama yang dikaji adalah: apakah kebangkitan ini hanya romantisasi masa lalu atau sebuah upaya serius untuk menghidupkan kembali warisan Ottoman dalam konteks kontemporer?

Kata kunci: Neo-Ottomanisme, Kesultanan Utsmani, Erdoğan

PENDAHULUAN

Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu imperium Islam paling berpengaruh dalam sejarah, yang selama lebih dari enam abad menguasai wilayah yang luas meliputi Eropa Timur, Asia Barat, hingga Afrika Utara. Peninggalan kekaisaran ini meninggalkan jejak kuat dalam peradaban Islam, dinamika budaya, serta tatanan politik yang kompleks. Kejatuhan kekhalifahan ini terjadi secara drastis pada awal abad ke-20 dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 di bawah kendali Mustafa Kemal Atatürk. Transformasi ini membawa gelombang modernisasi dan

sekularisasi yang mengarah ke barat, dengan tujuan untuk memutus keterkaitan identitas Turki baru dari akar Ottoman-Islam masa lalunya (Zurcher,Erik J.Turkey, 2004). Akibatnya, selama dekade-dekade berikutnya, Turki tampil sebagai negara sekuler yang secara tegas menolak simbol-simbol kekhalifahan maupun keagamaan dari era sebelumnya.

Namun, sejak awal abad ke-21, terjadi perubahan signifikan dalam lanskap politik dan budaya Turki, khususnya sejak naiknya Recep Tayyip Erdoğan bersama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ke tampuk kekuasaan. Perubahan ini dikenal dengan istilah Neo-Ottomanisme—sebuah pendekatan yang bertujuan untuk merevitalisasi elemen-elemen historis, kultural, dan ideologis dari warisan Ottoman ke dalam narasi kebangsaan dan politik luar negeri Turki saat ini. Fenomena ini tercermin dalam sejumlah kebijakan dan peristiwa penting, seperti pengembalian fungsi Hagia Sophia sebagai masjid, popularitas tayangan televisi berlatar sejarah Ottoman, peningkatan identitas keislaman, serta keterlibatan aktif Turki di kawasan bekas pengaruh Ottoman di Timur Tengah dan Afrika (Duran, Burhanettin, 2014).

Kebangkitan Neo-Ottomanisme tidak semata berakar pada nostalgia sejarah, melainkan menjadi bagian dari strategi politik dan upaya rekonstruksi identitas nasional. Pemerintahan Erdoğan memanfaatkan warisan Ottoman sebagai instrumen budaya sekaligus alat politik—untuk mengokohkan legitimasi kekuasaan domestik, menghimpun dukungan masyarakat, serta memperluas pengaruh strategis di panggung internasional. Simbolisme Ottoman, seperti penggunaan gelar tradisional, gaya arsitektur khas, hingga rujukan ke nilai-nilai Islam, digunakan sebagai sarana untuk memperkuat ikatan emosional dengan basis pendukung konservatif, sekaligus untuk mengukuhkan peran Turki sebagai pemimpin dunia Islam (Öktem, Kerem. 2011).

Meski demikian, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa kebangkitan Neo-Ottomanisme berisiko mengikis dasar-dasar sekularisme negara, memperkuat tendensi otoriter dalam pemerintahan, serta memicu ketegangan di kawasan akibat munculnya kembali memori imperialisme masa lalu.Oleh karena itu, Neo-Ottomanisme harus dipahami sebagai fenomena yang kompleks—baik sebagai strategi konsolidasi politik dalam negeri maupun sebagai instrumen ekspansi pengaruh luar negeri.

METODE DAN LITERATUR REVIEW

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis kecenderungan-kecenderungan simbolik, historis, dan kebijakan yang muncul dalam konteks Neo-Ottomanisme pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan di Turki. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi berdasarkan interpretasi terhadap data sekunder yang tersedia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas sejarah Kekaisaran Ottoman, kebijakan luar negeri Turki, simbolisme budaya, serta perkembangan politik di bawah pemerintahan Erdoğan. Penelusuran juga mencakup sumber-sumber digital terpercaya seperti artikel dari media daring bereputasi yang membahas topik Neo-Ottomanisme.

PEMBAHASAN

Kebangkitan Neo-Ottomanisme, Apakah Turki Menghidupkan Kembali Ottoman

Dinasti Usmani bukan sekadar satu dari banyak kekaisaran Islam yang pernah berjaya; ia merupakan simbol supremasi politik dan kebudayaan Islam yang bertahan lebih dari enam abad dan membentang luas di Asia, Eropa, hingga Afrika. Dinasti ini berakar dari suku Kayı, salah satu cabang bangsa Oghuz Turki yang bermigrasi dari Asia Tengah. Suku inilah yang kemudian menjadi fondasi kekuatan baru di bawah Osman I pada awal abad ke-14.Menariknya, asal-usul suku Kayı kini kembali mendapat tempat dalam wacana identitas nasional Turki kontemporer. Pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan menghidupkan kembali simbol-simbol Ottoman, baik melalui wacana politik, kurikulum pendidikan, hingga budaya populer seperti serial televisi Diriliş: Ertuğrul, yang menghadirkan kembali semangat perjuangan Islam dan etos kepahlawanan Turki masa lampau.

Lahirnya Dinasti Usmani ditandai dengan kecermatan strategi militer dan diplomasi Osman I. Ia memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah Bizantium yang tengah melemah. Penaklukan Bursa menandai fase awal kemunculan kekaisaran yang kemudian berkembang pesat hingga ke Eropa Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kejatuhan Konstantinopel ke tangan Mehmed II pada 1453 menjadi titik balik penting yang mengokohkan Istanbul sebagai pusat peradaban Islam dan kekuasaan baru dunia.Dalam konteks masa kini, langkah ekspansi ini seolah direfleksikan kembali dalam kebijakan luar negeri Turki modern. Keterlibatan aktif di Suriah, dukungan terhadap konflik di Libya dan Azerbaijan, serta peran dalam dinamika geopolitik Mediterania, mencerminkan upaya Turki untuk kembali berperan sebagai aktor utama kawasan, mirip seperti yang dilakukan Kekaisaran Usmani pada masa silam. Namun, bentuknya kini bukan dalam invasi militer tradisional, melainkan melalui diplomasi, bantuan pertahanan, serta kerja sama strategis lintas negara.

Sistem pemerintahan Usmani menganut monarki absolut, di mana Sultan memegang kekuasaan tertinggi, baik secara politik maupun religius. Gelar Khalifah baru digunakan setelah dua abad kekuasaan berlangsung, menunjukkan evolusi dari kerajaan regional menjadi simbol kepemimpinan umat Islam global. Meskipun Erdoğan tidak mengklaim gelar serupa, gaya kepemimpinannya yang tegas dan sarat simbolisme keagamaan menunjukkan kemiripan dengan model otoritarianisme ala Usmani, meski tetap dalam bingkai republik modern.Sementara itu, dalam aspek militer, Dinasti Usmani dikenal melalui pembentukan pasukan Janissari militer elit yang terlatih dan setia pada Sultan. Dalam era modern, Turki membangun kekuatan militernya melalui teknologi canggih seperti drone Bayraktar, peningkatan industri pertahanan domestik, dan perannya dalam NATO. Geliat militer ini menunjukkan kesinambungan strategi pertahanan sebagai alat kekuatan nasional yang sudah mengakar sejak era Usmani.

Pada masa kejayaannya antara tahun 1402 hingga 1566, Kekaisaran Ottoman mencapai puncaknya, baik dalam hal ekspansi wilayah, kekuatan politik, maupun pengaruh militer. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad al-Fatih dan Sulaiman al-Qanuni, Ottoman tidak hanya menaklukkan wilayah yang luas, tetapi juga memperkenalkan simbolisme dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kebijakan politik mereka, termasuk pengambilalihan gelar Khalifah dan lambang-lambang kebesaran Islam. Kejayaan ini mengilhami Turki modern dalam membangun

kembali narasi kebanggaan yang berkaitan dengan masa lalu imperial, sebuah narasi yang kini dikenal sebagai Neo-Ottomanisme.

Turki kontemporer, di bawah Recep Tayyip Erdoğan, semakin menggenggam warisan sejarah ini sebagai bagian dari strategi politik dan identitas nasional yang lebih besar. Penggunaan simbolisme Kekhalifahan, termasuk bendera Nabi dan pedang Nabi, serta penyatuan gelar Sultan dan Khalifah, menggambarkan upaya Turki untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin dunia Islam. Ini bukan hanya simbolisme belaka, tetapi juga mencerminkan keinginan Turki untuk kembali memainkan peran sentral dalam geopolitik regional dan global, dengan memperluas pengaruhnya ke kawasan yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, seperti Timur Tengah, Balkan, dan Afrika Utara.

Kebijakan luar negeri Turki di era Neo-Ottomanisme mengingatkan kita pada kebijakan ekspansif Sultan Sulaiman al-Qanuni yang tidak hanya memperluas wilayah melalui peperangan, tetapi juga membangun pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Turki masa kini, meskipun tidak dalam bentuk imperium seperti dahulu, menunjukkan keseriusannya dalam membentuk ulang tatanan internasional, dengan memainkan peran penting dalam isu-isu seperti Palestina, Suriah, dan peran strategisnya di NATO serta hubungan dengan negara-negara Islam lainnya.Kejayaan sejarah Ottoman, meskipun sudah lama berlalu, tetap menjadi sumber inspirasi bagi kebangkitan politik Turki modern, yang berusaha menghidupkan kembali banyak aspek dari warisan Ottoman dalam upaya untuk mengukuhkan posisi Turki sebagai kekuatan utama di dunia Islam dan kawasan.

Tampak bahwa kebangkitan Neo-Ottomanisme bukanlah nostalgia semata, melainkan bagian dari strategi politik dan budaya yang disengaja. Pemerintah Turki tidak berniat mengembalikan sistem Kekhalifahan secara formal, namun secara aktif memanfaatkan simbol, nilai, dan warisan sejarah Ottoman sebagai fondasi untuk membentuk identitas nasional yang berakar pada Islam, sejarah kebesaran, dan kepemimpinan global. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Turki saat ini tengah menghidupkan kembali semangat Kekaisaran Usmani dalam bentuk yang lebih kontekstual dan modern. Neo-Ottomanisme menjadi proyek peradaban yang membaurkan sejarah, budaya, dan geopolitik dalam upaya menjadikan Turki sebagai pemimpin regional sekaligus pelindung dunia Islam (Imam Ibnu Hajar).

Neo-Ottomanisme merupakan suatu orientasi politik dan kultural yang berkembang di Turki pasca reformasi pemerintahan sekuler menuju arah yang lebih Islami, khususnya di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan. Orientasi ini tidak hanya berupaya meromantisasi masa kejayaan Kesultanan Utsmani, tetapi juga mengaktualisasikan simbol-simbolnya dalam konteks politik kontemporer. Kebangkitan ini membawa misi mengembalikan pengaruh peradaban Islam dengan menjadikan Turki sebagai pusat kepemimpinan dunia Islam modern. Konversi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada tahun 2020 menjadi salah satu simbol penting dari proyek kebangkitan tersebut. Keputusan tersebut memiliki daya tarik religius yang kuat sekaligus muatan politik simbolik. Ia dipandang sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan bahwa Turki sedang bergerak mendekati akar historisnya sebagai kekhalifahan. Fenomena ini diperkuat oleh narasi yang tersebar luas melalui media sosial, yang dengan cepat menjangkau kalangan muslim milenial di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Media sosial memainkan peran strategis dalam menyebarkan narasi Neo-Ottomanisme, di mana komunitas daring seperti sahabatErdogan, Gen.saladin, dan Osman Media aktif memproduksi konten sejarah Islam, kisah kepemimpinan tokoh-tokoh Utsmani, serta kebijakan politik Erdoğan yang dikaitkan dengan semangat kekhalifahan. Komunitas ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk opini dan imajinasi kolektif tentang kejayaan Islam masa lalu yang dapat dihidupkan kembali di era sekarang.

Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fenomena sosial yang berkembang di Indonesia, yakni gerakan hijrah di kalangan generasi milenial. Gerakan ini mencerminkan pencarian identitas spiritual yang cenderung personal namun mengalami kolektivisasi melalui ruang digital. Dalam konteks ini, narasi kejayaan Islam masa Utsmani menjadi bagian dari konten dakwah yang menarik bagi generasi muda. Neo-Ottomanisme pun tidak hanya menjadi proyek politik Turki, melainkan juga masuk dalam ruang dakwah transnasional yang mempertemukan aspirasi keislaman dengan romantisme sejarah.

Dengan demikian, kebangkitan Neo-Ottomanisme tidak hanya dapat dibaca sebagai proyek rekonstruksi sejarah semata, tetapi juga sebagai strategi diplomasi budaya dan politik identitas yang mengintegrasikan masa lalu dengan masa kini. Turki secara aktif memanfaatkan warisan Kesultanan Utsmani untuk memperluas pengaruhnya dalam dunia Islam melalui simbol, narasi, dan teknologi media. Dalam konteks ini, warisan Ottoman tidak sekadar dikenang, tetapi dihidupkan kembali sebagai pijakan ideologis dalam membentuk identitas dan solidaritas umat Islam di era digital.

Meskipun Turki adalah negara sekuler yang dibentuk oleh Kemal Atatürk, negara ini tetap memiliki kesamaan dengan ideologi Kemalisme. Di antara nilai-nilai tersebut adalah patriotisme dan loyalitas terhadap negara. Baik Kemalisme maupun Neo-Ottomanisme pada dasarnya adalah ideologi yang berkaitan dengan pembangunan negara. Oleh karena itu, Neo-Ottomanisme memiliki banyak kesamaan dengan nasionalisme Kemalis, meskipun jauh lebih ambisius dan idealis dalam proyeksinya mengenai Turki sebagai kekuatan regional (Bubun Nursya'ban, 2020). Diketahui bahwa kaum Kemalis menganut gagasan Pencerahan, meskipun mereka mengklaim bahwa tindakan mereka terutama bertujuan untuk menolak ambisi imperial besar negara-negara Eropa. Asumsi ini didasarkan pada apa yang disebut "kompleks Sevres" yang diyakini oleh rakyat Turki, yaitu anggapan bahwa Eropa adalah kekuatan yang mengancam kesatuan nasional Turki. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak reformasi Atatürk bersifat pro-Barat, Mustafa Kemal tidak pernah beranggapan bahwa revolusi Kemalis harus melibatkan adopsi buta terhadap proyek-proyek Eropa. Ia meyakini bahwa modernisasi negara harus dianalisis dalam paradigma universal yang umum bagi setiap bangsa yang ingin menemukan tempatnya dalam tatanan dunia kontemporer. Dalam konteks ini, reformasi Kemalis bertujuan untuk membangun negara sekuler yang independen dan modern, bukan meniru negara Barat secara membabi buta.

tidak diragukan lagi bahwa ideologi Neo-Ottomanisme mengandung unsur revanchisme kontemporer. Neo-Ottomanisme menggantungkan harapan pada kebangkitan Pan-Turkisme. Berdasarkan tinjauan perkembangan ideologi ini secara kronologis, dapat disimpulkan bahwa sejak awal abad ke-20, Pan-Turkisme bersifat agresif dan ekspansionis. Oleh karena itu, menjadi titik tolak yang sesuai bagi Neo-Ottomanisme. Terlihat jelas bahwa Presiden Erdoğan menjalankan kebijakan yang menggabungkan elemen Neo-Ottomanisme dan Pan-Turkisme.

Sejak wafatnya Kemal Atatürk, yang mengusung doktrin "perdamaian di dalam negeri, perdamaian di dunia", Turki tidak pernah benar-benar meninggalkan Pan-Turkisme. Sejak awal 1930-an, negara ini mulai keluar dari orbit Kemalisme. Setelah Perang Dunia II, Turki mendapat dukungan finansial, militer, dan politik yang kuat dari Amerika Serikat, sehingga menjadi faktor geopolitik. Seperti yang dikatakan Ahmet Davutoglu dalam Strategic Depth: “Minoritas Muslim yang merupakan penerus negara Ottoman menjadi dasar pengaruh politik Turki di Balkan. Minoritas etnis Turki dan Muslim yang tinggal di wilayah seperti Bulgaria, Turki, dan Makedonia menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri Turki di Balkan.” Lebih lanjut, dalam membahas konstruksi "payung pertahanan" Turki, Davutoglu menekankan bahwa Turki harus memiliki hak hukum untuk campur tangan dalam isu-isu minoritas Muslim di Balkan, seperti dalam operasi militer di Siprus. Pernyataan ini menunjukkan ambisi terbuka para penguasa di Ankara untuk menciptakan Turki Raya, dengan memanfaatkan keberadaan minoritas etnis di wilayah Balkan.

Analisis terhadap Neo-Ottomanisme menunjukkan bahwa ideologi ini bertentangan dengan semangat integrasi Eropa yang diwujudkan dalam konsep Uni Eropa. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman, wilayah Turki hanya mencakup sekitar 7 persen dari wilayah Benua Eropa. Oleh karena itu, secara geografis, Turki tidak dapat dianggap sebagai negara Eropa. Selain itu, meskipun secara resmi Turki adalah republik parlementer, praktik pemerintahan bersifat otoriter dan konflik sipil sering kali kembali muncul. Oleh karena itu, satu-satunya pijakan identitas yang dimiliki oleh negara Turki adalah sejarah kekaisaran masa lalunya.

Meskipun terjadi manipulasi media dalam bentuk buku, film, konferensi, dan pameran yang mencoba membangkitkan kembali “Masa Keemasan Ottoman”, bangsa-bangsa Balkan tidak akan dengan mudah menerima kembalinya era tersebut, mengingat memori negatif dan banyaknya makam peninggalan masa lalu di wilayah itu. Oleh karena itu, dengan mengadopsi "kedalaman strategis" dari Neo-Ottomanisme sebagai pilihan strategis, elit politik di Turki justru merusak peluang negara itu untuk bergabung dengan Uni Eropa. Di sisi lain, Uni Eropa terlalu sempit untuk mewadahi ambisi Turki, setidaknya seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi. Jika Turki berhasil masuk Uni Eropa, pengaruh Neo-Ottomanisme kemungkinan besar akan ditekan, dan ambisi politik Turki untuk memperluas pengaruhnya akan ditentang (Ivaylo Hristov, 2019). doktrin dan kebijakan Neo-Ottomanisme mengalami evolusi dan koreksi dalam konteks perubahan cepat lingkungan politik domestik dan internasional. Meskipun secara ideologis mirip, terdapat perbedaan jelas antara versi Neo-Ottomanisme Recep Erdoğan dan Ahmet Davutoğlu. Keduanya menawarkan formula Neo-Ottomanisme yang tidak sepenuhnya tumpang tindih. Versi Erdoğan lebih menekankan pada kepentingan nasional Turki, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan AS di Timur Tengah atau Balkan. Ketidaksesuaian ini membuka ruang bagi tumpang tindihnya kepentingan antara Rusia dan Turki.

Simbolisme Budaya Dan Arsitektur

Salah satu manifestasi paling nyata dari kebangkitan Neo-Ottomanisme adalah konversi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid pada tahun 2020. Keputusan ini bukan hanya bernuansa religius, tetapi juga sarat muatan politik simbolik. Hagia Sophia, yang pernah menjadi gereja Bizantium lalu diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II, dijadikan simbol kejayaan Kesultanan Utsmani. Erdoğan menggunakan momen ini untuk mengasosiasikan pemerintahannya

dengan warisan Ottoman dan sebagai bentuk penolakan terhadap sekularisme radikal warisan Atatürk.Salah satu strategi paling mencolok dalam kebangkitam Neo-Ottomanisme dibawah kepemimpinan Recep Tayyib Erdogan adalah penggunaan simbolisme budaya dan juga arsitektur khas era ottoman sebagai instrument politik dan ideologis.Pemerintahan Erdogan secara aktif menampilkan elemen-elemen visual,historis,dan juga religious dari kesulthananutsmaniyah untuk membentuk identitas nasional yang baru,yang lebih religious daan berakar pada masa lalu kejayaan islam.

Salah satu langkah paling simbolik dalam proses ini adalah keputusan pemerintah Turki pada tahun 2020 untuk mengembalikan fungsi Hagia Sophia sebagai masjid. Bangunan bersejarah yang dulunya merupakan gereja Bizantium dan kemudian diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II pasca penaklukan Konstantinopel pada 1453, sempat dijadikan museum oleh rezim sekuler Mustafa Kemal Atatürk pada 1934. Pengalihfungsian kembali bangunan ini menjadi masjid memiliki makna simbolik yang mendalam, baik bagi umat Islam di Turki maupun secara global. Siti Nurhasanah menyatakan bahwa kebijakan ini mencerminkan kebangkitan identitas Islam di tengah dominasi sekularisme, sekaligus membangkitkan kembali narasi kejayaan Utsmaniyah yang dikubur oleh modernisasi sekuler (Siti Nurhasan, 2021).

Tidak hanya itu, pemerintahan Erdoğan juga membangun berbagai masjid megah yang mengadopsi gaya arsitektur Ottoman. Contoh paling menonjol adalah Masjid Çamlıca di Istanbul yang rampung pada 2019. Dengan kubah raksasa dan menara yang tinggi menjulang, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol dominasi Islam dalam lanskap arsitektur dan budaya Turki kontemporer. Menurut Ahmad Baharudin, pembangunan masjid-masjid bergaya Ottoman ini merupakan bagian dari proyek ideologis negara untuk membentuk ruang publik yang sarat akan simbol keislaman dan identitas nasional baru yang berbasis pada nilai-nilai Ottoman (Ahmad Baharudin, 2020).

Simbolisme budaya juga disalurkan melalui industri media populer, terutama serial televisi bertema sejarah yang menampilkan tokoh-tokoh dan peristiwa penting dari era Utsmaniyah. Serial seperti Diriliş: Ertuğrul dan Kuruluş: Osman tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai alat penyebar nilai-nilai kepahlawanan Islam, nasionalisme religius, dan legitimasi politik. Rizal Sukma mengungkapkan bahwa tayangan-tayangan ini merupakan bagian dari strategi kekuatan lunak (soft power) Turki untuk membentuk opini publik domestik dan internasional, serta memperkuat posisi Turki sebagai pemimpin dunia Islam modern (Rizal Sukma, 2022). Dengan demikian, penggunaan simbol budaya dan arsitektur oleh Erdoğan bukan sekadar pelestarian sejarah, melainkan upaya strategis untuk merekonstruksi identitas nasional Turki melalui lensa Islam dan kejayaan Ottoman. Di satu sisi, ini menjadi bentuk perlawanan terhadap sekularisme, dan di sisi lain, menjadi sarana konsolidasi politik serta diplomasi budaya ke dunia Muslim.

Perubahan Identitas Nasional

Perubahan identitas nasional di Turki sejak awal abad ke-21 menunjukkan dinamika ideologis yang kompleks. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki secara perlahan meninggalkan paradigma identitas sekuler warisan Mustafa Kemal Atatürk dan mulai mengadopsi model identitas baru yang memadukan antara Islam politik dan nasionalisme Turki. Transformasi ini bukanlah perubahan yang semata bersifat

simbolik, melainkan mencerminkan proyek ideologis jangka panjang untuk mendefinisikan ulang "ke-Turki-an" (Turkishness) dalam konteks sejarah, agama, dan budaya.

Menurut M. Hakan Yavuz, sejak awal pemerintahan AKP, Erdoğan berupaya membangun narasi "komunitas imajiner" baru yang tidak lagi bersandar pada sekularisme Eropa, melainkan pada warisan Islam dan Ottoman sebagai elemen integratif dalam pembangunan identitas nasional (SETA Foundation, 2020). Dalam kerangka ini, sejarah Utsmaniyah direvitalisasi bukan hanya sebagai masa lalu yang mulia, tetapi sebagai sumber nilai dan legitimasi kontemporer.Perubahan identitas nasional ini diekspresikan secara sistematis dalam kebijakan pendidikan dan budaya. Dalam buku Islam dan Politik di Turki, Ali Arslan menyatakan bahwa kurikulum sejarah diubah untuk menekankan kembali pentingnya warisan Ottoman dan kontribusinya dalam peradaban Islam, serta mengurangi dominasi narasi Eropa-sentris yang sebelumnya menonjol pada era Kemalis (Soner Cagaptay, 2017). Pendidikan agama juga diperluas, dengan penambahan jam pelajaran keagamaan dan dibukanya ribuan sekolah Imam Hatip, yaitu sekolah agama Islam yang awalnya sempat dibatasi jumlahnya selama rezim sekuler.

Tidak hanya dalam pendidikan formal, media massa dan budaya populer juga memainkan peran besar. Serial televisi bertema sejarah seperti Diriliş: Ertuğrul, Payitaht: Abdülhamid, dan Kuruluş: Osman menggambarkan tokoh-tokoh Ottoman sebagai pahlawan Islam yang saleh, pemberani, dan penuh moralitas. Serial ini sangat populer di kalangan masyarakat Turki dan dunia Islam, dan menurut Bayram Balcı, menjadi alat efektif dalam membangun sentimen kebangsaan berbasis Islam tradisional (M. Hakan Yavuz, 2003).

Lembaga negara seperti Diyanet İşleri Başkanlığı (Direktorat Urusan Keagamaan) mengalami ekspansi peran secara signifikan. Jika sebelumnya hanya berfungsi mengatur urusan ibadah, kini Diyanet berfungsi sebagai produsen wacana keagamaan yang mendukung narasi nasionalis-Islam Erdoğan. Menurut laporan SETA (Foundation for Political, Economic and Social Research), anggaran Diyanet meningkat lebih dari 100% sejak 2010, dan lembaga ini memiliki peran aktif dalam menyusun khutbah, pendidikan moral, hingga diplomasi keagamaan di luar negeri.

Simbol-simbol publik juga mengalami perubahan. Lambang-lambang sekuler seperti patung Atatürk di beberapa tempat mulai dikurangi visibilitasnya, dan digantikan oleh pembangunan masjid, kompleks budaya Islam, serta renovasi bangunan Ottoman yang dulunya diabaikan. Erdoğan secara pribadi sering menghadiri acara-acara keagamaan besar dan tidak jarang merujuk pada Sultan Abdulhamid II atau Mehmed II dalam pidato-pidatonya, sebagai cara untuk membangkitkan kesadaran historis religius di tengah Masyarakat (Ali Arslan, 2020). Menurut Soner Cagaptay dalam The New Sultan, strategi Erdoğan dalam membentuk ulang identitas nasional tidak semata untuk memperkuat Islam dalam politik, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas politik jangka panjang melalui narasi sejarah, agama, dan identitas bersama. Upaya ini sekaligus merupakan respons terhadap krisis identitas nasional pasca-Kemalisme yang dianggap gagal merepresentasikan aspirasi spiritual (Bayram Balcı, 2018).

Ekspansi Kebijakan Luar Negri

Kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan telah mengalami transformasi mendalam yang mencerminkan paradigma baru berbasis warisan Ottoman dan

identitas Islam politik. Konsep Neo-Ottomanisme, yang awalnya hanya dipahami sebagai nostalgia terhadap masa kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah, kini berkembang menjadi kerangka ideologis dan strategis dalam perumusan kebijakan luar negeri negara. Di bawah pengaruh pemikiran tokoh-tokoh seperti Ahmet Davutoğlu—mantan Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri—Neo-Ottomanisme tidak lagi bersifat simbolik semata, tetapi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk konkret seperti kebijakan geopolitik, intervensi militer, aliansi strategis, serta ekspansi pengaruh budaya.

Secara geopolitik, Turki aktif membangun kembali pengaruhnya di kawasan-kawasan yang dulunya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, seperti Timur Tengah, Balkan, Afrika Utara, dan Kaukasus. Di Suriah dan Libya, misalnya, Turki secara terbuka melakukan intervensi militer, baik dalam bentuk dukungan kepada kelompok oposisi maupun pengerahan pasukan dan peralatan militer. Langkah ini tidak hanya mencerminkan kepentingan strategis, tetapi juga mengindikasikan ambisi Turki untuk memainkan peran sebagai kekuatan regional utama, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman.

Di kawasan Balkan, Turki membangun jaringan kerja sama ekonomi dan budaya, serta mendanai restorasi situs-situs sejarah Ottoman sebagai bagian dari diplomasi budaya. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan kembali ikatan emosional dan historis dengan komunitas Muslim di wilayah tersebut. Sementara itu, di Afrika Utara, Turki memperluas pengaruhnya melalui bantuan kemanusiaan, investasi, dan kemitraan ekonomi, khususnya di negara-negara seperti Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Diplomasi ekonomi dan bantuan kemanusiaan ini sering kali disertai dengan narasi keagamaan dan sejarah yang memperkuat posisi Turki sebagai pelindung umat Islam global.

Di tingkat diplomasi internasional, Turki di bawah Erdoğan juga mulai menggeser orientasi dari pendekatan yang sebelumnya pro-Barat menuju pendekatan yang lebih multi-polar dan otonom. Hal ini terlihat dari upaya membangun hubungan strategis dengan kekuatan-kekuatan non-Barat seperti Rusia, China, dan negara-negara Teluk, sambil tetap mempertahankan peran penting dalam NATO dan hubungan dengan Uni Eropa meskipun sering kali bersifat konfrontatif. Orientasi kebijakan luar negeri ini menunjukkan upaya Erdoğan untuk menegaskan identitas Turki sebagai kekuatan independen dengan visi peradaban yang berakar pada sejarah Islam dan warisan Ottoman.

Transformasi ini juga tercermin dalam narasi politik domestik, di mana Erdoğan dan partainya, AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan), sering kali menggunakan simbolisme Ottoman dalam pidato politik, pembangunan infrastruktur monumental seperti Masjid Camlica, dan penggunaan bahasa yang menekankan kontinuitas sejarah antara Turki modern dan Kekaisaran Ottoman. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari upaya rekonstruksi identitas nasional yang bercorak Islam konservatif dan berorientasi pada kebesaran masa lalu.Dengan demikian, Neo-Ottomanisme menjadi lebih dari sekadar strategi politik luar negeri. Ia merupakan ekspresi dari proyek kebudayaan dan ideologis yang berupaya menghidupkan kembali warisan imperial sebagai sumber legitimasi dan alat perluasan pengaruh Turki di panggung global.

Menurut Ahmet Davutoğlu dalam buku Strategic Depth, Turki memiliki keunggulan geopolitik karena dikelilingi oleh wilayah yang secara historis terhubung dengan Kekhalifahan Utsmaniyah. Oleh karena itu, negara ini harus memosisikan dirinya sebagai kekuatan pusat (central power) yang memainkan peran historisnya di dunia Islam dan Eurasia.Neo-Ottomanisme juga hadir

dalam kebijakan luar negeri Turki, terutama melalui pendekatan "kedalaman strategis" (strategic depth) yang dikembangkan oleh Ahmet Davutoğlu. Doktrin ini menyatakan bahwa warisan Ottoman dapat menjadi landasan pengaruh geopolitik Turki di kawasan bekas kekuasaannya, seperti Balkan, Timur Tengah, dan Afrika Utara[4]. Keterlibatan Turki dalam konflik di Suriah, Libya, dan dukungan terhadap minoritas Muslim di Bosnia serta Siprus menunjukkan bagaimana politik identitas Ottoman dijadikan alat ekspansi regional.

a. Intervensi Militer dan Aliansi Regional

Erdoğan secara aktif menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Di Suriah, Turki melancarkan beberapa operasi militer seperti Operation Euphrates Shield (2016), Olive Branch (2018), dan Peace Spring (2019), yang ditujukan untuk mengamankan perbatasan dari kelompok Kurdi YPG/PKK serta ISIS. Namun, di balik tujuan keamanan, intervensi ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mengukuhkan zona pengaruh dan menanamkan nilai-nilai politik Turki di wilayah utara Suriah (Gönül Tol, 2020). Dalam konflik Libya, Turki secara terang-terangan mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli, mengirim drone bersenjata Bayraktar TB2, pasukan bayaran Suriah, serta menandatangani perjanjian maritim strategis dengan Libya pada 2019. Menurut Soner Cagaptay, ekspansi ini bertujuan menghalangi dominasi Mesir dan UEA serta memperluas pengaruh Turki di Mediterania Timur (Soner Cagaptay, 2017).

Turki juga membuka pangkalan militer di Qatar dan Somalia. Di Qatar, kehadiran militer Turki berfungsi sebagai penyeimbang terhadap blokade negara-negara Teluk yang dipimpin Arab Saudi, sekaligus memperkuat aliansi dengan negara yang sama-sama mendukung Ikhwanul Muslimin. Sementara di Somalia, pangkalan militer Turki berfungsi sebagai pusat pelatihan militer terbesar di luar negeri dan simbol kepemimpinan Turki di Afrika Timur (Galip Dalay, 2020).

Ekspansi militer Turki di bawah Erdoğan tidak hanya mencerminkan ambisi regional, tetapi juga menjadi bagian integral dari proyek Neo-Ottomanisme yang ingin menghidupkan kembali pengaruh historis Turki di bekas wilayah Kekaisaran Utsmani. Selain membuka pangkalan militer, Turki juga aktif dalam menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara Afrika dan Asia Tengah, termasuk penandatanganan perjanjian militer dengan negara-negara seperti Azerbaijan, Sudan, dan Pakistan. Langkah ini memperluas jejaring aliansi strategis Turki yang tidak lagi terpusat pada NATO, melainkan menjangkau kawasan-kawasan yang secara historis dan kultural terhubung dengan warisan Ottoman.

Dalam kasus Azerbaijan, keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 menunjukkan kemauan Ankara untuk menggunakan kekuatan militer dan teknologi pertahanan, seperti drone Bayraktar TB2, guna memperkuat sekutu etnis-Turki dan memperluas pengaruh di Kaukasus. Keberhasilan Azerbaijan merebut kembali wilayah yang disengketakan dengan bantuan Turki menjadi simbol efektifnya aliansi militer baru yang dibangun Erdoğan.

Turki juga aktif dalam mengembangkan kompleks industri pertahanan sebagai bagian dari diplomasi keamanan. Dengan menjual persenjataan ke negara-negara sekutu dan menggelar latihan militer bersama, Turki memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer alternatif di dunia Islam yang tidak tergantung pada Barat. Intervensi militer ini, meskipun kerap dikritik secara

internasional, memberikan legitimasi domestik bagi Erdoğan dengan menghidupkan narasi kejayaan masa lalu dan menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan kepentingan nasional Turki.Pendekatan militer ini menyatu dengan diplomasi ideologis dan kultural yang lebih luas, menciptakan wajah baru kebijakan luar negeri Turki yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membentuk ulang konstelasi kekuatan regional. Jika kamu ingin, kita bisa bahas juga peran industri drone Turki dan dampaknya terhadap geopolitik global.

b. Diplomasi Islam Politik

Dalam konteks ideologi, Erdoğan membangun hubungan erat dengan kelompok-kelompok Islam politik transnasional seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Tunisia, dan Gaza. Turki menjadi pelindung utama organisasi-organisasi ini setelah Arab Spring, yang secara ideologis sejalan dengan semangat kebangkitan Islam politik modern. Dalam buku Kebangkitan Islam Politik di Timur Tengah, Siti Nurhasanah menyebutkan bahwa Erdoğan memainkan peran ganda sebagai pemimpin negara dan simbol solidaritas Islam global yang menolak dominasi sekularisme Arab (Siti Nurhasanah, 2018).

Aliansi dengan Hamas di Palestina, dukungan terhadap Ikhwanul Muslimin Mesir, serta kritik tajam terhadap Israel dan negara-negara Arab konservatif menunjukkan arah baru diplomasi Turki yang menggabungkan kepentingan geopolitik dengan narasi keagamaan.

Dalam konteks diplomasi Islam politik, Recep Tayyip Erdoğan secara konsisten menampilkan dirinya tidak hanya sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai simbol solidaritas umat Islam global. Setelah Arab Spring, Turki tampil sebagai pelindung utama kelompok-kelompok Islam politik transnasional seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Tunisia, dan Gaza. Erdoğan menjalin hubungan erat dengan organisasi-organisasi ini karena kesamaan ideologi dan semangat kebangkitan Islam politik modern. Seperti yang disebutkan Siti Nurhasanah dalam bukunya Kebangkitan Islam Politik di Timur Tengah, Erdoğan memainkan peran ganda dalam menolak dominasi sekularisme Arab, sembari membangun citra Turki sebagai pemimpin dunia Islam yang baru.

Aliansi strategis dengan Hamas di Palestina, dukungan terbuka terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir, serta kritik tajam terhadap Israel dan negara-negara Arab konservatif seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi bagian dari arah baru diplomasi Turki. Diplomasi ini tidak hanya menekankan kepentingan geopolitik, tetapi juga mengedepankan narasi keagamaan yang kuat. Melalui media internasional seperti TRT World, Turki menyebarkan pandangan Islam politik yang moderat dan mengangkat isu-isu penindasan umat Islam di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Turki juga menjadi tempat berlindung bagi para aktivis Islamis dari negara-negara yang mengalami represi politik, memperkuat posisinya sebagai pusat baru Islam politik.

Pendekatan Erdoğan ini juga merefleksikan upaya rekonstruksi identitas nasional Turki yang mulai bergeser dari sekularisme warisan Kemal Atatürk menuju Islamisme berbalut nasionalisme Ottoman. Simbol-simbol kekaisaran Utsmani kembali dimunculkan dalam politik dan budaya, menciptakan kesan bahwa Turki sedang menghidupkan kembali peran historisnya sebagai penjaga umat Islam. Diplomasi Islam politik Erdoğan pada akhirnya menjadi bagian penting dari proyek Neo-Ottomanisme yang menggabungkan warisan sejarah, kepentingan geopolitik, dan solidaritas keagamaan dalam satu narasi besar kebangkitan Turki.

c. Soft Power, Diplomasi Budaya dan Kemanusiaan

Selain kekuatan militer dan politik, Turki juga mengintensifkan penggunaan soft power. Melalui lembaga-lembaga seperti TİKA, Maarif Foundation, dan Yunus Emre Institute, Turki menyebarkan pengaruhnya ke dunia Muslim melalui pendidikan, beasiswa, restorasi situs Ottoman, bantuan bencana, dan promosi bahasa Turki. Di Bosnia, Albania, Sudan, dan bahkan Indonesia, lembaga-lembaga ini aktif membangun masjid, sekolah, serta program pelatihan guru agama.

Dalam buku Erdoğan dan Neo-Ottomanisme, Ahmad Baharudin mencatat bahwa soft power Turki menjadi instrumen penting untuk membentuk persepsi positif terhadap Turki sebagai pelanjut kejayaan Ottoman sekaligus aktor utama dunia Islam abad ke-21.Selain itu, penyiaran serial televisi sejarah seperti Diriliş: Ertuğrul dan Payitaht Abdülhamid juga menjadi alat propaganda kultural. Serial ini tidak hanya populer di dalam negeri, tetapi juga diterima luas di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Media menjadi medium ideologis yang menyebarkan gagasan tentang kepemimpinan Islam, keadilan, dan kejayaan Turki.

Diplomasi budaya dan kemanusiaan yang dijalankan Turki memperlihatkan bagaimana strategi Neo-Ottomanisme tidak hanya bergerak melalui kekuatan keras, tetapi juga memanfaatkan aspek emosional dan spiritual umat Islam. Pendekatan ini membentuk jejaring loyalitas dan simpati yang menguntungkan posisi Turki dalam percaturan global, terutama di tengah kekosongan kepemimpinan dunia Islam pasca kemunduran sejumlah negara besar Arab. Erdoğan berhasil membangun narasi bahwa Turki adalah mercusuar peradaban Islam kontemporer yang mampu menjembatani masa lalu yang gemilang dengan masa kini yang penuh tantangan.

d. Paradigma Baru Geopolitik Regional

Kebijakan luar negeri Turki dalam era Erdoğan tidak lagi bersifat reaksioner atau berbasis pada kepentingan Barat. Justru sebaliknya, Turki mulai bersikap independen, bahkan konfrontatif terhadap negara-negara NATO dan Uni Eropa jika dirasa mengancam visinya. Hubungan dekat dengan Rusia, intervensi unilateral di kawasan konflik, serta pembangunan industri pertahanan mandiri menjadi bagian dari doktrin “Otonomi Strategis”.

Menurut Burhanettin Duran dalam Journal of Turkish Foreign Policy Studies, pendekatan Erdoğan menggabungkan pendekatan realis dalam mempertahankan kepentingan nasional dengan pendekatan ideologis yang mencoba membentuk ulang arsitektur geopolitik dunia Muslim (Burhanettin Duran, 2021).

Paradigma baru ini juga terlihat dari keterlibatan aktif Turki dalam berbagai konflik regional yang sebelumnya dihindari oleh pemerintahan-pemerintahan terdahulu. Di Suriah, Turki meluncurkan operasi militer lintas batas untuk menghadang milisi Kurdi yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sekaligus menegaskan peran Turki sebagai kekuatan penentu di kawasan. Di Libya, Turki memberikan dukungan militer kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli, menantang pengaruh Mesir dan Uni Emirat Arab yang mendukung pasukan Khalifa Haftar. Selain itu, keterlibatan aktif dalam konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan menandai perluasan lingkup

kepentingan geopolitik Turki hingga ke wilayah Kaukasus, memperkuat hubungan dengan negara-negara Turki beretnis Turki di Asia Tengah.

Pembangunan industri pertahanan domestik juga menjadi tulang punggung dari strategi otonomi strategis ini. Produksi drone tempur seperti Bayraktar TB2, kapal perang, dan sistem pertahanan udara buatan lokal tidak hanya meningkatkan kemandirian militer Turki, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan teknologi strategis nasional. Produk-produk ini bahkan diekspor ke berbagai negara, menjadikan Turki sebagai aktor baru dalam pasar persenjataan global dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara penerima.

Di sisi lain, orientasi geopolitik Turki kini tidak lagi semata-mata bergantung pada poros Barat-Timur, tetapi meluas ke Selatan dan Timur. Pendekatan ini mencerminkan kebangkitan visi multipolar Turki yang ingin membangun tatanan dunia alternatif yang lebih merepresentasikan kepentingan negara-negara Muslim dan Global South. Melalui organisasi seperti D-8 (Developing Eight) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Turki aktif mendorong agenda-agenda baru yang mendukung peran sentral dunia Islam dalam arsitektur politik global.

Ketegangan Dengan Warisan Kemalisme dan Eropa

Neo-Ottomanisme sering dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Kemalisme yang berfokus pada sekularisme, nasionalisme Turki, dan integrasi ke Barat. Meskipun Erdoğan tetap mempertahankan struktur republik, arah politiknya yang otoriter dan Islami justru menjauhkan Turki dari impian integrasi ke Uni Eropa. Kebijakan-kebijakan tersebut menciptakan ketegangan ideologis antara visi Turki sebagai negara sekuler-modern dan Turki sebagai penerus kekhalifahan.

Ketegangan ini semakin nyata dalam perdebatan publik dan kebijakan domestik yang mencerminkan pergeseran identitas nasional Turki. Di bawah Erdoğan, simbol-simbol Islam mulai kembali mendominasi ruang publik, termasuk pengubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid, yang secara simbolik dianggap sebagai penolakan terhadap warisan sekularisme Kemalis. Kebijakan semacam ini tidak hanya mencerminkan kembalinya elemen-elemen Islam dalam politik, tetapi juga menggeser orientasi kultural Turki dari Eropa menuju dunia Islam dan Timur Tengah.

Penolakan terhadap nilai-nilai liberal yang diasosiasikan dengan Eropa, seperti kebebasan pers, independensi yudisial, dan hak-hak minoritas, juga semakin memperdalam jurang antara Turki dan Uni Eropa. Meskipun secara formal Turki masih menjadi kandidat keanggotaan Uni Eropa, proses negosiasi telah lama stagnan akibat kritik tajam terhadap praktik otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Erdoğan. Di sisi lain, Erdoğan justru memanfaatkan ketegangan ini untuk membangun narasi bahwa Barat tidak pernah benar-benar menerima Turki sebagai bagian dari mereka, dan bahwa masa depan Turki ada pada kebangkitan identitasnya sendiri yang berakar pada Islam dan sejarah Ottoman.

Ketegangan ini juga terlihat dalam respons kelompok-kelompok oposisi domestik, khususnya dari kalangan kemalis dan sekuler, yang melihat kebijakan Erdoğan sebagai ancaman terhadap fondasi republik modern Turki. Ketegangan antara dua kutub ini—Islamisme Neo-Ottoman dan sekularisme Kemalis—terus menjadi medan tarik-menarik dalam politik identitas Turki kontemporer. Dengan demikian, Neo-Ottomanisme bukan hanya proyek geopolitik, tetapi

juga merupakan upaya rekonstruksi identitas nasional yang menantang warisan ideologis pendiri Republik Turki.

Evolusi Ideologis Erdogan dan Davutoglu

Meskipun sama-sama mengedepankan gagasan Neo-Ottomanisme, Recep Tayyip Erdoğan dan Ahmet Davutoğlu menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara mereka memahami dan menerapkan ideologi ini. Erdoğan cenderung menerapkan Neo-Ottomanisme secara pragmatis dan berorientasi pada nasionalisme, dengan menekankan kekuatan negara dan peran dominan kepemimpinan politik. Ia banyak menggunakan simbol-simbol kejayaan Ottoman dalam retorika politiknya serta menekankan pentingnya kekuasaan militer dan kedaulatan nasional untuk memperkuat posisi Turki di kancah internasional. Dalam hal ini, Erdoğan menunjukkan pendekatan yang lebih keras dan langsung, termasuk melalui intervensi militer di kawasan seperti Suriah dan Libya, serta membangun hubungan strategis yang fleksibel, baik dengan negara-negara Barat maupun Rusia.

Sebaliknya, Davutoğlu mengembangkan versi Neo-Ottomanisme yang lebih idealistik dan berlandaskan pada konsep diplomasi. Melalui doktrin Strategic Depth, ia melihat peran Turki sebagai jembatan antara peradaban Timur dan Barat serta pemimpin dunia Islam dalam aspek moral dan intelektual. Davutoğlu mengutamakan penggunaan kekuatan lunak (soft power) seperti kerja sama budaya, pendidikan, dan kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip dialog dan harmoni dengan negara tetangga. Pendekatan ini tercermin dalam doktrinnya yang terkenal, “zero problems with neighbors”, yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Turki selama masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri.

Secara keseluruhan, Erdoğan dan Davutoğlu menunjukkan dua wajah Neo-Ottomanisme yang berbeda: satu lebih menekankan kekuasaan negara dan simbol-simbol identitas Islam dalam kerangka politik nasional, sedangkan yang lain lebih menonjolkan peran diplomatik dan tanggung jawab historis Turki dalam membina hubungan dengan dunia Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjabaran diatas,maka dapat disimpulkan bahwa Neo-Ottomanisme mencerminkan upaya strategis pemerintah Turki, khususnya di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, untuk merekonstruksi identitas nasional melalui simbolisme budaya, arsitektur, dan narasi kejayaan Islam masa lalu. Konversi Hagia Sophia menjadi masjid, pembangunan masjid bergaya Ottoman, serta produksi media populer bertema sejarah, menjadi instrumen simbolik yang menegaskan arah baru identitas Turki yang lebih religius dan berakar pada warisan Kesultanan Utsmani. Dalam konteks ini, identitas nasional tidak lagi didasarkan pada sekularisme ala Kemalisme, melainkan pada semangat pan-Islamisme dan pan-Turkisme yang lebih ekspansionis dan transnasional. Neo-Ottomanisme tidak hanya menjadi alat politik domestik, tetapi juga strategi diplomasi budaya yang menempatkan Turki sebagai pusat kepemimpinan dunia Islam modern. Meskipun menghadapi resistensi dari pihak Barat dan kawasan Balkan, kebangkitan ideologi ini memperlihatkan bagaimana warisan sejarah dihidupkan kembali untuk membentuk solidaritas umat dan menegaskan posisi geopolitik Turki di era global.

Neo-Ottomanisme juga merupakan proyek ideologis dan geopolitik yang secara aktif membentuk ulang identitas nasional dan peran internasional Turki di bawah kepemimpinan Recep

Tayyip Erdoğan. Perubahan identitas nasional dilakukan dengan meninggalkan sekularisme Kemalis dan menghidupkan kembali warisan Islam serta kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah melalui pendidikan, media populer, simbol publik, dan perluasan peran lembaga keagamaan negara. Di tingkat global, Neo-Ottomanisme diterjemahkan dalam kebijakan luar negeri yang ekspansionis—memadukan intervensi militer, diplomasi Islam politik, dan soft power budaya—untuk memperkuat pengaruh Turki di kawasan bekas kekuasaan Ottoman dan dunia Islam secara umum.

Paradigma geopolitik Turki pun bergeser dari ketergantungan pada Barat menuju sikap independen yang lebih tegas, bahkan konfrontatif, termasuk menjalin hubungan baru dengan Rusia dan negara-negara non-Barat. Dalam prosesnya, muncul ketegangan dengan warisan Kemalisme dan nilai-nilai Uni Eropa yang dulu menjadi arah utama pembangunan Turki modern. Meskipun sama-sama mengusung semangat Neo-Ottomanisme, Erdoğan dan Davutoğlu merepresentasikan dua pendekatan yang berbeda: Erdoğan bersifat pragmatis-nasionalistik, sedangkan Davutoğlu lebih idealistik dan diplomatik.Secara keseluruhan, Neo-Ottomanisme bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah instrumen untuk membangun identitas nasional baru, mengonsolidasikan kekuasaan domestik, dan mereposisi Turki sebagai pemimpin dunia Islam abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Baharudin, *Politik Simbolik dalam Arsitektur Era Erdogan, Jurnal Budaya dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 1 (2020)

Bubun Nursya'ban, *Neo-Ottomanisme dan Isu Hagia Sophia: Digital Religion dan Pengaruh Popularitas Erdogan terhadap Kaum Milenial Islamis di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020)

Burhanettin Duran, "*The Strategic Autonomy Doctrine of Turkish Foreign Policy"*, Journal of Turkish Foreign Policy Studies, Vol. 8, No. 2 (2021)

Duran,Burhanettin."*Understanding the AK party'sidentity politics:'Neo-ottomanism'Revisited*."insight turkey 16,no.2 (2014)

Galip Dalay, "*Turkey's Quest for a Permanent Military Presence in Africa*",(Brookings Institute, 2020)

Gönül Tol, "*Turkey's Military Operations in Syria: Objectives and Implications*",(Middle East Institute, 2020)

Imam Ibnu Hajar, From Zero to Hero: The History of the Ottoman Empire (1299–1566 AD) (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

Ivaylo Hristov,*Neo-Ottomanism –Emergence,ideology and political Doctrine*,(2019)

Öktem, Kerem. *Angry Nation: Turkey since 1989*.(London: Zed Books, 2011)

Rizal Sukma, *Soft Power Turki dan Serial Televisi Islam, Analisa Politik Internasional* Vol. 5, No. 1 (2022)

SETA Foundation, *The Diyanet Report: Institutional Expansion and Ideological Shifts*, (SETA Publications, 2020)

Siti Nurhasan,*Neo-ottomanisme dan Transformasi identitas islam di turk*,jurnal ilmu politik dan komunikasi Vol.10,no.2 (2021)

Siti Nurhasanah, *Kebangkitan Islam Politik di Timur Tengah*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2022)

Soner Cagaptay, The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey,(I.B. Tauris, 2017)

Soner Cagaptay, *The New Sultan: Erdogan and the Crisis of Modern Turkey*,(I.B. Tauris, 2017)

Zurcher,Erik J.Turkey:*A Modern History*,(London:I.B.Tauris,2004)